



STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR

BANTUAN KEUANGAN

2024

PEMERINTAH DAERAH KOTA BOGOR
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH

Jl. Kapten Muslihat No. 21, RT. 001/RW. 001, Pabaton, Kecamatan Bogor Tengah, Kota Bogor 16122
Tlp. (0251) 8338052, website:www.bappeda.kotabogor.go.id



PEMERINTAH DAERAH KOTA BOGOR

BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH

BIDANG PERENCANAAN PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH (P2EPD)

Nomor SOP	: SOP/P2EPD.1/006
Lintas Fungsi Peta Proses Bisnis	: Melaksanakan Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan
Aktifitas Lintas Fungsi	: Melaksanakan Forum Perangkat Daerah
Tgl. Pembuatan	: 03 Januari 2024
Tgl. Revisi	:
Tgl. Efektif	: 03 Januari 2024
Disahkan oleh	: Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Riset Dan Inovasi Daerah Kota Bogor
	<p>BAPPERIDA KOTA BOGOR Rudy Mashudi, S.T., M.P. NIP. 197707062006041018</p>
Judul SOP	: BANTUAN KEUANGAN

DASAR HUKUM

1. Undang-Undang No 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional. (lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2004 nomor 104, tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421)
2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pusat dan Daerah
3. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, Dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah
5. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2020 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah
6. Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 3 tahun 2021 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Bogor
7. Peraturan Wali Kota Bogor Nomor 59 Tahun 2023 Tentang Tugas, Fungsi, Uraian Tugas Dan Tata Kerja Di Lingkungan Badan Perencanaan Pembangunan, Riset Dan Inovasi

KUALIFIKASI PELAKSANA

1. Memahami Tugas Dan Fungsi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Bogor
2. Memahami Organisasi Perangkat Daerah Kota Bogor
3. Memahami Peraturan Perundang-undangan yang berkaitan dengan Materi Perencanaan Pembangunan Daerah
4. Memahami Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK)

KETERKAITAN	PERALATAN/ PERLENGKAPAN
1. SOP Pengendalian Arsip	1. Komputer/ Laptop 2. Printer 3. Internet 4. ATK
PERINGATAN	PENCATATAN DAN PENDATAAN
1. Keterlambatan Penyerahan Laporan Bantuan Keuangan dari SKPD berakibat keterlambatan penyusunan pelaporan dan pengiriman Bantuan Keuangan Wali Kota pada Gubernur dan Pemerintah Pusat; 2. Keterlambatan penyusunan pelaporan dan pengiriman Bantuan Keuangan akan berakibat pada pengurangan besaran alokasi Bantuan Keuangan tahun berikutnya.	1. Data Bantuan Keuangan SKPD 2. Laporan Bantuan Keuangan 3. Bukti Distribusi Laporan Bantuan Keuangan

No	Aktivitas	Pelaksana			Mutu Baku			Ket
		Bidang P2PD	OPD/ Perangkat Daerah	Bidang Pengampu	Persyaratan/ Kelengkapan	Waktu	Output	
1	Bidang P2PD mengirim surat edaran usulan Bantuan Keuangan Provinsi.				Surat edaran	60 menit	Surat edaran	
2	OPD mengajukan usulan ke Bappeda yang ditujukan ke Kepala Badan.				Usulan Bankeu	60 menit	Usulan Bankeu	
3	Bidang P2PD memeriksa usulan untuk menentukan Bidang Pengampu usulan.				Usulan Bankeu	120 menit	Usulan Bankeu	
4	Bidang Pengampu mengundang Perangkat Daerah terkait, yang mengusulkan DAK untuk melengkapi persyaratan.				Usulan Bankeu	120 menit	Usulan Bankeu	
5	Perangkat Daerah melengkapi persyaratan dan menginput pada aplikasi Bankeu.				Persyaratan Bankeu	30 menit	Persyaratan Bankeu, aplikasi Bankeu	
6	Bidang P2PD dan Bidang Pengampu memonitor kelengkapan persyaratan dan hasil input.				Persyaratan Bankeu, hasil input aplikasi	60 menit	Persyaratan Bankeu, hasil input aplikasi	
7	Bidang Pengampu melakukan asistensi kepada Perangkat Daerah pada Forum Perangkat Daerah Provinsi.				Persyaratan Bankeu, hasil input aplikasi	60 menit	Persyaratan Bankeu, hasil input aplikasi	
8	Bidang P2PD memonitor usulan pada aplikasi Provinsi.				Usulan Bankeu	60 menit	Usulan Bankeu	